



ANALISIS PERBANDINGAN KURIKULUM DI INDONESIA DAN JEPANG: STRUKTUR, IMPLEMENTASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Oleh

Subkhan Syaroni¹, Santika Lya Diah Pramesti²

^{1,2} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

subkhan.syaroni@mhs.uingusdur.ac.id¹, santikalyadihpramesti@uingusdur.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kurikulum di Indonesia dan Jepang dari tiga aspek utama, yaitu struktur, implementasi, dan kebijakan pemerintah. Melalui metode kajian literatur, studi ini menemukan bahwa kurikulum Indonesia menekankan nilai moral dan agama, serta pembelajaran berbasis proyek. Di sisi lain, kurikulum Jepang lebih fokus pada keterampilan praktis dan pengembangan karakter melalui pendekatan pendidikan moral yang terintegrasi. Implementasi kurikulum di Indonesia masih menghadapi kendala seperti kesenjangan infrastruktur pendidikan, sementara Jepang berhasil menerapkan sistem yang seragam meski dengan tantangan tekanan akademik. Kebijakan pemerintah berperan penting dalam mendukung inovasi dan keberlanjutan sistem pendidikan, di mana Jepang menunjukkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang adaptif dan relevan.

Kata Kunci: kurikulum, Indonesia, Jepang

Abstract

This study aims to compare the curricula of Indonesia and Japan in three key aspects: structure, implementation, and government policies. Using a literature review method, the study reveals that Indonesia's curriculum emphasizes moral and religious values and project-based learning. In contrast, Japan's curriculum focuses more on practical skills and character development through integrated moral education. The implementation of the curriculum in Indonesia faces challenges such as educational infrastructure disparities, whereas Japan successfully applies a uniform system despite academic pressure issues. Government policies play a vital role in supporting innovation and sustainability in education systems, with Japan demonstrating greater stability compared to Indonesia. This study provides recommendations for developing adaptive and relevant educational policies.

Keywords: curriculum, Indonesia, Japan

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di berbagai negara. Dalam konteks globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, sistem pendidikan dituntut untuk terus berkembang agar mampu menghasilkan generasi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Salah satu indikator penting keberhasilan sistem pendidikan adalah kurikulum yang menjadi panduan utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, perbandingan kurikulum antarnegara dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Bjork, 2019).

Indonesia, sebagai negara berkembang, telah mengalami banyak perubahan kurikulum sejak kemerdekaan. Dimulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2021, perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun, pelaksanaan kurikulum di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti disparitas infrastruktur pendidikan, kurangnya pelatihan guru, serta kesenjangan kualitas antarwilayah (Mulyasa, 2021).

Sebaliknya, Jepang memiliki sistem pendidikan yang stabil dan terstruktur dengan baik. Kurikulum di Jepang dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan keterampilan modern, sehingga mampu membentuk siswa yang kompeten secara akademik sekaligus memiliki karakter yang kuat. Pemerintah Jepang secara berkala merevisi kurikulum untuk

menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal (MEXT, 2022).

Seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas tantangan global, kurikulum pendidikan di berbagai negara diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga memiliki kecakapan hidup yang relevan. Di Indonesia, pengenalan Kurikulum Merdeka merupakan respons terhadap kebutuhan akan pendidikan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Kurikulum ini mendorong pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Namun, implementasinya menghadapi kendala besar, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan pelatihan guru (Kemendikbud, 2022).

Di sisi lain, Jepang telah lama dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan yang menyeimbangkan aspek akademik dan moral. Pengajaran di Jepang tidak hanya fokus pada mata pelajaran akademik tetapi juga pada nilai-nilai moral yang diajarkan melalui kegiatan sehari-hari, seperti *tokkatsu* atau kegiatan khusus. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun karakter siswa, meskipun tekanan akademik yang tinggi tetap menjadi salah satu isu utama dalam sistem pendidikan Jepang (Yamasaki, 2021).

Kedua negara juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam evaluasi hasil pembelajaran. Di Indonesia, asesmen nasional mulai menggantikan ujian nasional sebagai bentuk evaluasi yang lebih komprehensif, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter.

Sebaliknya, Jepang tetap mempertahankan ujian masuk universitas sebagai tolok ukur utama, meskipun pemerintah mulai mengadopsi metode evaluasi alternatif seperti portofolio dan wawancara. Perbedaan ini mencerminkan prioritas masing-masing negara dalam merancang kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya mereka (OECD, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kurikulum di Indonesia dan Jepang dari tiga aspek utama, yaitu struktur, implementasi, dan kebijakan pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih efektif dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat global.

II. PEMBAHASAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis perbandingan kurikulum di Indonesia dan Jepang. Literature review merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik tertentu guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap isu yang dikaji (Snyder, 2019).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk artikel jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta dokumen kebijakan terkait kurikulum di Indonesia dan Jepang. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur melalui platform akademik seperti Google Scholar, ProQuest, dan Springer,

dengan kata kunci seperti curriculum in Indonesia, curriculum in Japan, educational policy, dan curriculum implementation. Kriteria inklusi literatur meliputi publikasi dalam sepuluh tahun terakhir dan relevansi langsung terhadap topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tiga aspek utama yang menjadi fokus penelitian: struktur kurikulum, implementasi kurikulum, dan kebijakan pemerintah. Setiap tema dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau tantangan dalam pelaksanaan kurikulum di kedua negara. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan wawasan yang holistik mengenai perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Jepang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum di Indonesia dirancang untuk mencerminkan visi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang berwibawa dan kuat, serta mampu memberdayakan seluruh warga negara Indonesia (UU Nomor 20 Tahun 2003). Kurikulum pendidikan Indonesia telah mengalami banyak perubahan, mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini. Kurikulum Merdeka, yang mulai diperkenalkan secara bertahap sejak tahun 2021, memiliki struktur yang lebih fleksibel dibandingkan kurikulum sebelumnya. Struktur ini menekankan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), yang bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi siswa (Kemendikbudristek, 2023).

Pada jenjang pendidikan dasar (SD), fokus pembelajaran ditekankan pada penguatan literasi dan numerasi, serta pengembangan karakter siswa. Struktur kurikulum di SD mencakup mata pelajaran utama seperti Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Pendidikan Pancasila, yang diintegrasikan dengan muatan lokal (Mulyasa, 2021).

Di jenjang pendidikan menengah (SMP dan SMA), struktur kurikulum dirancang untuk memberikan kebebasan siswa dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Model ini dikenal sebagai peminatan atau program pilihan, di mana siswa SMA dapat memilih jurusan seperti IPA, IPS, atau Bahasa (Kemendikbudristek, 2023).

Selain itu, pendekatan profil pelajar Pancasila menjadi inti dari Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam seluruh proses pembelajaran, yang mencakup dimensi kemandirian, gotong royong, kebhinekaan global, dan kebijaksanaan lokal (Rahmawati, 2022). Namun, implementasi struktur kurikulum ini tidak terlepas dari tantangan. Masalah

seperti kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta pelatihan guru yang belum merata menjadi hambatan dalam pelaksanaannya (Kemendikbudristek, 2023).

Sistem pendidikan di Jepang memiliki struktur kurikulum yang sangat terorganisir, yang dirancang untuk mendukung pengembangan akademik, keterampilan hidup, dan nilai-nilai moral siswa. Kurikulum di Jepang ditentukan oleh Monbukagakusho (MEXT) yaitu lembaga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi di Jepang yang secara berkala melakukan revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman (MEXT, 2022).

Kurikulum yang dipakai oleh Sekolah di Jepang adalah kurikulum yang telah distandarkan secara nasional. Mata pelajaran yang distandarkan secara nasional antara lain bahasa Jepang, Bahasa Inggris, Matematik, Sejarah, Olah Raga, Pendidikan Jasmani, Keterampilan dan Kesenian, Science, Integrated Course, dan Home Room. Walaupun begitu, setiap sekolah di masing-masing Prefektur mempunyai kebebasan untuk menyusun kurikulum sekolah. Jadi untuk setiap daerah, kurikulum di mata pelajaran pilihan bisa

saja berbeda. Pelajaran pilihan ditekankan pada jenjang kelas 2 dan 3 di mana jumlah kredit per jenjang rata-rata 30.

Kurikulum sekolah di Jepang meliputi tiga aspek yaitu, subjects (kamoku), pendidikan moral (doutouku;kyouiku) dan extra-kurikuler. Subjects atau mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran wajib di SD, mata pelajaran wajib dan pilihan di SMP dan SMA. Pendidikan moral tidak berupa mata pelajaran khusus seperti di Indonesia, tetapi berupa konseling selama satu jam pelajaran dalam seminggu yang dilakukan oleh guru wali kelas. Tidak ada penilaian atau nilai raport untuk mata pelajaran ini. Extra kurikuler dapat berupa kegiatan olah raga, seni, kegiatan OSIS, atau kegiatan sekolah.

Kurikulum di level sekolah disusun dengan kendali penuh dari The Board of Education di tingkat prefectur dan municipal (distrik). Karena kedua lembaga ini masih terkait erat dengan MEXT, maka pengembangan kurikulum Jepang masih sangat kental sifat sentralistiknya. Namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Central Council for Education (chuuou shingi kyouiku kai) pada tahun 1997 memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum di masa mendatang.

Pendidikan pra-sekolah di Jepang dimulai dari usia tiga tahun, di mana anak-anak dapat mengikuti taman kanak-kanak (TK) atau youchien, baik negeri maupun swasta, dengan lama pendidikan dua hingga tiga tahun. TK bertujuan membantu perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan bahasa anak melalui lingkungan yang sehat dan edukatif. Pendidikan di TK menekankan pembentukan karakter dan kebiasaan baik seperti disiplin, kerja sama, sopan santun, keberanian, serta kecintaan terhadap alam dan orang tua melalui pendekatan yang sesuai dengan dunia anak-anak dalam bentuk aktivitas menyenangkan.

Pendidikan wajib di Jepang berlangsung selama sembilan tahun, mencakup enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP), untuk anak-anak berusia enam hingga 15 tahun. Selain itu, terdapat juga Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi anak-anak berkebutuhan khusus pada tingkat dasar dan menengah. Anak-anak di Jepang mulai mengikuti pendidikan dasar (shougakkou) pada usia 6 tahun selama enam tahun, bertujuan memberikan pendidikan umum yang sesuai dengan perkembangan mental dan fisik mereka. Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan mencakup berbagai mata pelajaran seperti bahasa Jepang,

aritmatika, IPA, kebiasaan hidup (seikatsu), musik, seni, pendidikan jasmani, pendidikan moral, dan studi lingkungan. Metode pembelajaran di sekolah dasar menekankan pengalaman langsung melalui eksperimen, pengamatan, serta kerja kelompok untuk melatih kerja sama, toleransi, dan berpikir kritis. Mata pelajaran seikatsu mengajarkan kemandirian dan kebiasaan hidup sehari-hari, menggantikan pembelajaran teori seperti IPA/IPS di awal masa sekolah. Pelajaran bahasa dan berhitung mendapat porsi lebih besar, disusul pendidikan jasmani, estetika seperti musik dan menggambar, serta pelajaran agama yang diajarkan sebagai bagian dari pendidikan moral di sekolah keagamaan.

Semua anak-anak yang telah menyelesaikan sekolah dasar wajib untuk belajar di sekolah menengah selama tiga tahun sampai akhir tahun ajaran di mana mereka mencapai usia 15. Sekolah menengah pertama wajib untuk anak-anak antara usia 12 dan 15 di mana di sekolah ini diberikan pendidikan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan mental dan fisik mereka, atas dasar pendidikan yang diberikan di sekolah dasar.

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama sembilan tahun, siswa di

Jepang dapat melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan mengikuti ujian masuk. Terdapat tiga jenis program di SMA: penuh waktu (tiga tahun), paruh waktu, dan korespondensi (tiga tahun atau lebih), di mana dua program terakhir ditujukan bagi pekerja muda yang membutuhkan fleksibilitas. Semua program ini menghasilkan ijazah pendidikan menengah atas. Berdasarkan isi pengajarannya, SMA terbagi menjadi tiga kategori: program umum, khusus, dan terpadu. Program umum memberikan pendidikan dasar bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau belum menentukan jalur kejuruan. Program khusus ditujukan bagi siswa yang telah memilih bidang kejuruan tertentu, seperti pertanian, industri, perdagangan, keperawatan, hingga seni dan bahasa. Sementara itu, program terpadu yang diperkenalkan pada 1994, menggabungkan elemen program umum dan khusus untuk mengakomodasi minat, kemampuan, serta rencana karir siswa yang beragam.

Meski sistem kurikulum di Jepang dianggap sukses dalam menghasilkan siswa yang disiplin dan kompetitif, ada tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah tekanan akademik yang tinggi, yang dapat menyebabkan stres pada siswa. Namun, pemerintah

Jepang terus berupaya meningkatkan keseimbangan antara pencapaian akademik dan kesejahteraan siswa melalui reformasi kurikulum yang lebih manusiawi (Bjork, 2019).

2. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum di Indonesia menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Sejak diperkenalkannya Kurikulum Merdeka, pemerintah berupaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan abad ke-21. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, yang dirancang untuk mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas siswa (Kemendikbudristek, 2023). Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus, terutama di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang belum memadai.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi tenaga pendidik. Banyak guru yang merasa belum siap untuk mengadopsi pendekatan baru ini karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan pemahaman tentang filosofi kurikulum tersebut. Pelatihan intensif sebenarnya telah disediakan, tetapi cakupannya masih terbatas, terutama

untuk guru-guru di daerah terpencil (Mulyasa, 2021). Selain itu, distribusi materi ajar dan modul pembelajaran juga menjadi kendala, karena tidak semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau bahan ajar cetak.

Implementasi kurikulum ini juga dihadapkan pada tantangan dalam hal evaluasi pembelajaran. Kurikulum Merdeka menekankan pada asesmen formatif dan autentik, yang berbeda dengan pendekatan berbasis ujian standar pada kurikulum sebelumnya. Guru dituntut untuk lebih fleksibel dalam mengevaluasi perkembangan siswa, tetapi hal ini memerlukan peningkatan kompetensi guru dalam merancang asesmen yang sesuai. Di sisi lain, siswa juga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif untuk memahami tujuan dari pendekatan evaluasi baru ini (Kemendikbudristek, 2023).

Selain faktor internal, keberhasilan implementasi kurikulum juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan Kurikulum Merdeka ke dalam konteks lokal, misalnya dengan mengadopsi pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan potensi wilayah masing-masing.

Namun, tidak sedikit pula daerah yang masih kesulitan menyesuaikan kurikulum dengan kondisi setempat karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (Rahmawati, 2022).

Meski menghadapi berbagai tantangan, implementasi Kurikulum Merdeka tetap menunjukkan hasil positif di beberapa sekolah percontohan. Guru yang berhasil menerapkan kurikulum ini melaporkan peningkatan antusiasme siswa dalam belajar, terutama dalam proyek-proyek berbasis masalah nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan dukungan yang memadai, Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan (Mulyasa, 2021).

Implementasi kurikulum di Jepang sangat terstruktur dan diawasi secara ketat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT). Kurikulum di setiap jenjang pendidikan ditetapkan secara nasional, tetapi pemerintah daerah dan sekolah diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga standar pendidikan nasional sambil mengakomodasi variasi kondisi regional (MEXT, 2022). Implementasi

kurikulum di Jepang sangat terstruktur dan diawasi secara ketat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT). Kurikulum di setiap jenjang pendidikan ditetapkan secara nasional, tetapi pemerintah daerah dan sekolah diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga standar pendidikan nasional sambil mengakomodasi variasi kondisi regional (MEXT, 2022).

Pada jenjang pendidikan dasar (*shougakkou*), fokus implementasi adalah membangun fondasi literasi, numerasi, serta nilai-nilai moral siswa. Guru di Jepang tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing yang mendukung pengembangan karakter siswa. Setiap hari, waktu khusus dialokasikan untuk pelajaran moral (*doutoku*) dan kegiatan kebersamaan, seperti membersihkan kelas bersama-sama, yang merupakan bagian dari pembelajaran non-akademik. Pendekatan ini menciptakan rasa tanggung jawab dan disiplin pada siswa sejak dini (Yamasaki, 2021). Di tingkat pendidikan menengah pertama (*chuugakkou*), implementasi kurikulum semakin menekankan pada keseimbangan antara akademik dan non-akademik. Siswa mulai menghadapi jadwal pelajaran yang lebih

padat dengan tambahan mata pelajaran seperti bahasa asing, sains, dan geografi. Namun, tokkatsu (tokubetsu katsudou), yaitu kegiatan khusus seperti kegiatan ekstrakurikuler dan kerja kelompok, tetap menjadi bagian integral dari pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mendorong siswa belajar bekerja dalam tim, mengasah keterampilan sosial, dan mengatasi tantangan secara kolektif (Bjork, 2019).

Tekanan akademik menjadi salah satu isu yang dihadapi dalam implementasi kurikulum di tingkat pendidikan menengah atas (koukou). Kurikulum pada jenjang ini dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian masuk universitas yang sangat kompetitif. Siswa sering kali mengikuti pelajaran tambahan di sekolah atau bimbingan belajar di luar jam sekolah. Namun, pemerintah Jepang telah berupaya mengurangi beban akademik dengan mengintegrasikan pendidikan moral dan budaya ke dalam kurikulum untuk menyeimbangkan aspek akademik dan emosional siswa (MEXT, 2022).

Salah satu kekuatan utama dalam implementasi kurikulum di Jepang adalah pelatihan guru yang konsisten dan berkualitas tinggi. Guru tidak hanya diwajibkan mengikuti pelatihan awal sebelum memulai karier mereka, tetapi

juga mendapatkan pelatihan lanjutan secara berkala. Sistem ini memastikan bahwa para guru tetap memahami perubahan kurikulum serta mampu mengimplementasikan metode pengajaran yang sesuai. Namun, tantangan seperti kesenjangan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi perhatian, meskipun pemerintah terus berupaya mengurangi disparitas tersebut melalui alokasi sumber daya yang lebih merata. Secara keseluruhan, implementasi kurikulum di Jepang mencerminkan upaya sinergis antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat untuk mendukung pendidikan yang komprehensif. Meski menghadapi tantangan, pendekatan holistik yang diterapkan telah berhasil menghasilkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan kurikulum nasional, yang terus mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah memperkenalkan berbagai kurikulum, mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan secara bertahap mulai tahun 2021. Perubahan

ini mencerminkan visi pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, relevan, dan kompetitif secara global (Kemendikbudristek, 2023).

Salah satu kebijakan strategis pemerintah adalah penguatan konsep Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Profil Pelajar Pancasila menekankan dimensi seperti kemandirian, gotong royong, dan kebhinekaan global, yang dirancang untuk menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki kecakapan abad ke-21. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada struktur kurikulum tetapi juga pada metode pembelajaran, yang kini lebih terfokus pada pembelajaran berbasis proyek (Rahmawati, 2022).

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, perubahan kurikulum pada era Kurikulum 2013 (K13) dipicu oleh kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Kurikulum ini menekankan pendekatan tematik terpadu dan

pembelajaran aktif, di mana siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Namun, implementasinya menghadapi kendala, seperti kurangnya pelatihan bagi guru dan disparitas fasilitas pendidikan antar daerah (Mulyasa, 2021).

Di era Kurikulum Merdeka, kebijakan pemerintah berfokus pada desentralisasi pendidikan, di mana sekolah diberikan kebebasan lebih besar untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan konteks lokal. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa platform digital seperti Merdeka Mengajar, yang menyediakan modul pembelajaran, materi ajar, dan pelatihan guru secara online. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan di daerah terpencil yang minim infrastruktur teknologi (Kemendikbudristek, 2023).

Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada ujian nasional (UN) sebagai penentu kelulusan siswa. Sebagai gantinya, evaluasi pembelajaran kini menggunakan pendekatan asesmen nasional (AN), yang mencakup survei karakter, literasi, dan numerasi. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk

menciptakan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pengembangan kemampuan siswa secara holistik (Rahmawati, 2022).

Meskipun berbagai kebijakan telah menunjukkan hasil positif, tantangan tetap ada, terutama dalam hal implementasi di lapangan. Disparitas kualitas pendidikan antar wilayah, kurangnya pelatihan guru, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan yang harus diatasi oleh pemerintah. Namun, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif, kebijakan pemerintah diharapkan dapat terus mendorong perkembangan kurikulum nasional ke arah yang lebih baik.

Kebijakan pemerintah Jepang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan kurikulum nasional, yang didesain untuk mendukung visi pendidikan sebagai dasar pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang (Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology atau MEXT) memainkan peran utama dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. MEXT melakukan revisi kurikulum setiap 10 tahun untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan tantangan global (MEXT, 2022).

Salah satu kebijakan utama pemerintah Jepang adalah penguatan pendidikan karakter melalui integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum. Sejak revisi besar-besaran kurikulum pada tahun 2002, pendidikan moral (*doutoku*) telah diubah menjadi mata pelajaran mandiri, dengan fokus pada pengembangan etika, kerja sama, dan tanggung jawab sosial. Pada revisi kurikulum 2017, MEXT bahkan menambahkan evaluasi moral sebagai bagian dari asesmen siswa, menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun masyarakat yang berbudaya dan bermoral tinggi (MEXT, 2022).

Pemerintah Jepang juga memberikan perhatian besar pada pendidikan berbasis keterampilan abad ke-21. Dalam revisi kurikulum terbaru, MEXT menekankan pentingnya pendidikan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital dan globalisasi. Salah satu kebijakan penting adalah integrasi pelajaran pemrograman di tingkat pendidikan dasar, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi teknologi siswa sejak usia dini. Kebijakan ini diiringi dengan penyediaan pelatihan bagi guru dan peningkatan infrastruktur digital di sekolah-sekolah (Bjork, 2019). Selain itu, kebijakan pemerintah Jepang juga

memprioritaskan pendidikan berbasis lokal melalui konsep Chiiki Gakushuu (pembelajaran berbasis komunitas). Konsep ini mengintegrasikan konteks lokal ke dalam kurikulum, memungkinkan siswa untuk belajar tentang budaya, sejarah, dan potensi daerah mereka. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kurikulum nasional sesuai dengan kebutuhan lokal, yang membantu menciptakan keseimbangan antara standar nasional dan keberagaman regional.

Di sisi evaluasi, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan yang mendorong asesmen komprehensif, termasuk ujian nasional dan penilaian berbasis proyek. Ujian masuk universitas tetap menjadi salah satu tolok ukur penting dalam sistem pendidikan Jepang, tetapi pemerintah juga berusaha mengurangi tekanan akademik dengan mengembangkan metode evaluasi alternatif, seperti wawancara dan portofolio. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses belajar siswa (MEXT, 2022).

Namun, kebijakan pemerintah Jepang dalam perkembangan kurikulum nasional juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan

kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, disparitas dalam sumber daya manusia dan teknologi tetap menjadi masalah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Selain itu, resistensi terhadap perubahan kurikulum dari guru dan masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan baru (Bjork, 2019).

III. SIMPULAN

Dalam aspek struktur, kurikulum di Indonesia cenderung berbasis kompetensi dengan pengembangan nilai moral dan agama yang kuat, sementara Jepang lebih menekankan pada keterampilan praktis, kemandirian, dan pengembangan karakter. Perbedaan ini mencerminkan prioritas nasional masing-masing negara dalam membentuk generasi muda.

Dalam hal implementasi, Indonesia menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan kurikulum di berbagai daerah, terutama karena perbedaan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas. Jepang, di sisi lain, memiliki

sistem implementasi yang lebih seragam karena didukung oleh kebijakan pendidikan yang terintegrasi dan investasi besar di bidang pendidikan. Implementasi di Jepang menonjolkan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam proses pendidikan.

Kebijakan pemerintah di kedua negara memainkan peran penting dalam perkembangan kurikulum nasional. Pemerintah Indonesia secara berkala memperbarui kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan global dan teknologi, meskipun sering kali menghadapi kendala dalam tahap pelaksanaannya. Di Jepang, kebijakan pendidikan lebih stabil dan dirancang untuk mendukung inovasi tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang mendasar. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan mencerminkan kebutuhan sosial dan budaya masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bjork, C. (2019). *Indonesian Education: Practices and Challenges*. Jakarta: Routledge.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Kurikulum Merdeka*. Diakses dari <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>
- Mulyasa, E. (2021). *Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT), Japan. (2022). *Overview of Japanese Education*. Diakses dari <https://www.mext.go.jp>
- Rahmawati, I. (2022). Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(2), 134–145.
- Kemendikbud. (2022). *Transformasi Pendidikan melalui Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- OECD. (2020). *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.
- Yamasaki, Y. (2021). Educational Reform in Japan: Addressing Modern Challenges in Education. *Journal of East Asian Studies*, 18(4), 325–340.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Djawad, M. I. (2014). *Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara: Sistem Pendidikan di Jepang*. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.